

RANTAI NILAI KOMODITAS KOPI DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS KELOMPOK TANI HUTAN DI KINDANG, SULAWESI SELATAN

Nusrah Rusadi¹, Kletus Florianus Sera Gare², Marisi³, Puspa Sari⁴

^{1,2}Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

^{3,4}Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: nusrah.rusadi@staff.politanikoe.ac.id

Article History

Received: 19-07-2025

Revision: 10-08-2025

Accepted: 15-08-2025

Published: 31-08-2025

Abstract. This study aims to analyze the coffee commodity value chain within the Community Forest (HKm) scheme in Kindang Subdistrict, Bulukumba Regency, South Sulawesi. The research focused on mapping the value chain structure, identifying key actors, and examining institutional challenges and strengthening strategies. A descriptive qualitative approach with a case study method was applied. Data were collected through in-depth interviews 15 informants, consisting of 7 members/administrators of KTH, 3 managers of KUPS/Cooperatives, 3 collectors, and 2 NGO Facilitators, as well as field observations, and document reviews, and analyzed using a value chain analysis framework. The results revealed that the coffee value chain is still dominated by middlemen, while cooperatives have not functioned effectively as aggregators. Processing assets such as roasting and grinding machines remain underutilized due to limited technical skills and the absence of a collective production system. Farmers' income falls in the moderate category (IDR 18.9–20.4 million per year), indicating low value addition. Recommended strategies include improving technical capacity, optimizing the use of processing equipment collectively, product diversification, developing digital marketing channels, and implementing quality-based incentive systems. These findings underscore the importance of institutional strengthening and product downstreaming to enhance the competitiveness of HKm coffee and improve farmers' livelihoods.

Keywords: value chain, coffee, social forestry, institution, value addition

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai nilai komoditas kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kajian difokuskan pada pemetaan struktur nilai, identifikasi peran aktor, serta analisis kendala kelembagaan dan strategi penguatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan telaah dokumen, kemudian dianalisis dengan kerangka *value chain analysis*. Jumlah informan yang diwawancara sebanyak 15 orang, terdiri atas 7 anggota/pengurus KTH, 3 pengelola KUPS/Koperasi, 3 pengepul, dan 2 pendamping dari LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur rantai nilai kopi masih didominasi oleh jalur distribusi melalui tengkulak, sementara peran koperasi sebagai agregator belum berjalan optimal. Ketersediaan aset pengolahan kopi seperti mesin sangrai dan penghalus belum dimanfaatkan secara produktif karena keterbatasan keterampilan teknis dan absennya sistem produksi kolektif. Tingkat pendapatan petani berada pada kategori sedang (Rp.18,9 juta-Rp. 20,4 juta per tahun), yang mengindikasikan rendahnya nilai tambah. Strategi penguatan yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas teknis, pemanfaatan peralatan pengolahan secara kolektif, diversifikasi produk olahan, pengembangan pemasaran digital, serta penerapan sistem insentif berbasis mutu. Hasil ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan hilirisasi produk untuk meningkatkan daya saing kopi HKm dan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: rantai nilai, kopi, perhutanan sosial, kelembagaan, nilai tambah

How to Cite: Rusadi, N. & et al. (2025). Rantai Nilai Komoditas Kopi Dalam Skema Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Di Kindang, Sulawesi Selatan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6511-6524. [10.54373/ifijeb.v5i3.3849](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3849)

PENDAHULUAN

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kopi menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya di kawasan perhutanan sosial. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani adalah penerapan sistem agroforestri. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani kopi menunjukkan bahwa pendekatan ini layak dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan ekonomi di kawasan hutan (Simamora, 2024). Selain itu, sistem agroforestri kopi juga terbukti memberikan manfaat ekologis, seperti peningkatan keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, serta layanan ekosistem lainnya seperti pengendalian hama dan peningkatan kualitas hasil panen (Wright et al., 2024). Dengan demikian, agroforestri kopi merupakan solusi sosio-ekologis yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan negara secara legal. Skema ini mengedepankan keseimbangan antara upaya konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kawasan hutan secara lestari. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Kindang, skema HKm telah mendorong budidaya kopi jenis *Coffea arabica* dan *Coffea canephora* sebagai bagian dari usaha ekonomi produktif berbasis hutan. Pengelolaan kopi tersebut tidak terlepas dari dukungan kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) serta mitra eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun demikian, meskipun secara legal dan teknis masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya hutan, posisi dalam rantai nilai kopi masih relatif lemah akibat keterbatasan akses pasar, informasi harga, teknologi pascapanen, serta dukungan logistik.

Rantai nilai (*value chain*) merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk memetakan alur proses suatu produk sejak tahap hulu hingga hilir serta bagaimana nilai ekonomi ditambahkan di setiap tahapan (Kaplinsky & Morris, 2000). Dalam pertanian kopi, konsep ini mencakup proses mulai dari produksi di tingkat petani, pengolahan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen akhir. Petani kecil mampu memperoleh nilai tambah yang signifikan melalui pengolahan lanjutan, manajemen mutu, dan dukungan kelembagaan yang

memadai (Assefa, 2022; Prathita et al., 2023). Temuan tersebut menegaskan pentingnya strategi penguatan rantai nilai sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan KTH kopi dan daya saing agribisnis di tingkat lokal maupun global.

Meskipun pendekatan perhutanan sosial telah banyak dikaji dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek legalitas akses kelola, teknis budidaya, dan dinamika kelembagaan. Kajian yang secara khusus menelaah struktur dan dinamika rantai nilai komoditas kopi dalam konteks Hutan Kemasyarakatan (HKm) masih sangat terbatas, terutama yang mengeksplorasi peran aktor lokal, aliran produk serta distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan usaha tani kopi. Lebih lanjut, kajian yang secara komprehensif membahas hambatan yang dihadapi petani kopi dalam skema HKm untuk memperkuat posisinya dalam rantai nilai masih terbatas. Hambatan tersebut mencakup lemahnya posisi tawar terhadap pedagang perantara (tengkulak), rendahnya kualitas pascapanen akibat keterbatasan sarana pengolahan, serta belum optimal dukungan kelembagaan dalam membuka akses menuju pasar bernilai tambah tinggi.

Kondisi ini mempertegas pentingnya dilaksanakan analisis mendalam terhadap nilai ekonomi, sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan nilai tambah bagi petani yang selaras dengan prinsip keberlanjutan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya memetakan alur rantai nilai dan peran aktor yang terlibat, tetapi juga mengidentifikasi hambatan rekomendasi penguatan yang dihasilkan dapat bersifat aplikatif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur rantai nilai komoditas kopi, memetakan peran pelaku utama, serta mengkaji tantangan kelembagaan yang bersifat struktural yang dihadapi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan kopi di bawah skema HKm di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus yang difokuskan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pendekatan bertujuan untuk menggali secara mendalam struktur, aktor, serta dinamika rantai nilai komoditas kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sekaligus memahami peran kelembagaan lokal dalam mendukung pemasaran hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu pengurus dan anggota KTH yang aktif dalam kegiatan budidaya dan pemasaran kopi, koperasi atau kelompok usaha perhutanan sosial

(KUPS), pengepul, serta mitra pendamping dari lembaga swadaya masyarakat. Jumlah informan yang diwawancarai berjumlah 15 orang, terdiri atas 7 anggota/pengurus KTH, 3 pengelola KUPS/Koperasi, 3 pengepul, dan 2 pendamping dari LSM.

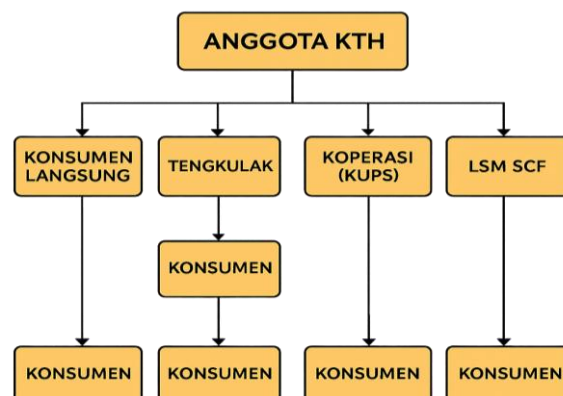
Data sekunder diperoleh dari dokumen kelompok seperti struktur organisasi, rencana kerja, catatan produksi dan penjualan, serta laporan instansi kehutanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *value chain analysis* untuk mengidentifikasi aktor, alur distribusi, serta fungsi dan hubungan antar pelaku dalam rantai nilai kopi. Analisis dilakukan melalui tahapan 1) identifikasi tahapan produksi hingga pemasaran, 2) pemetaan peran dan fungsi pelaku, 3) analisis kendala utama di setiap mata rantai, dan 4) sintesis strategi penguatan posisi kelembagaan KTH. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan anggota KTH dan fasilitator program.

HASIL

Struktur Rantai Nilai Komoditas Kopi dalam Skema HKm

Rantai nilai komoditas kopi yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba menunjukkan keberagaman saluran distribusi yang merepresentasikan strategi petani dalam menjual hasil produksi kopi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat jalur distribusi utama yang digunakan oleh petani dalam memasarkan kopi, diantaranya: 1) penjualan langsung kepada konsumen akhir, 2) penyaluran melalui tengkulak lokal, 3) kerja sama dengan koperasi atau Unit Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan 4) kemitraan dengan lembaga pendamping seperti LSM Sulawesi Community Foundation (SCF). Keempat jalur tersebut memperlihatkan kompleksitas hubungan antara produsen di tingkat tapak dengan berbagai aktor yang berperan dalam proses pengolahan dan pemasaran kopi.

“Kalau ada tengkulak datang, kami langsung jual. Tidak perlu pusing soal kualitas dan uangnya langsung dibayar di tempat” (*Anggota KTH, Wawancara, 3 April 2025*).



Gambar 1. Skema Rantai Nilai Komoditas Kopi di Kecamatan Kindang

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa dari seluruh jalur distribusi yang teridentifikasi, mayoritas petani memilih untuk menjual kopi melalui tengkulak. Hal ini disebabkan oleh kemudahan transaksi serta tidak adanya persyaratan teknis khusus terkait mutu produk. Meskipun demikian, penggunaan jalur ini cenderung menyebabkan rendahnya nilai jual kopi di tingkat petani karena tengkulak memiliki kontrol penuh terhadap harga dan tidak mengadopsi sistem penilaian mutu yang transparan.

“Harga biasanya ditentukan sepihak oleh pembeli. Kami tidak tahu patokan harga di pasar luar” (*Pengurus KTH, Wawancara, 3 April 2025*)

Sedangkan, jalur distribusi yang melibatkan koperasi maupun LSM menawarkan peluang peningkatan nilai tambah melalui pendekatan kelembagaan. Koperasi KTH yang telah memperoleh legalitas sebagai KUPS memiliki potensi sebagai aggregator hasil produksi dan pemasar kopi berkualitas, tetapi belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Hambatan struktural seperti lemahnya kapasitas manajerial, minimnya inovasi produk, dan belum adanya sistem pengelolaan usaha yang berorientasi pasar, menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan lembaga koperasi sebagai jalur distribusi utama.

“Kami sudah punya koperasi, tapi belum jalan maksimal, modalnya juga masih terbatas” (*Ketua KTH, Wawancara, 4 April 2025*)

LSM SCF berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan membuka akses pasar alternatif. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat proyek jangka pendek dan belum berhasil memperkuat kemandirian petani secara kelembagaan maupun ekonomi. Tidak adanya mekanisme kelembagaan yang terintegrasi antara petani, koperasi dan pasar menyebabkan distribusi kopi dari tapak ke konsumen akhir masih bersifat fragmatis dan bergantung pada kekuatan perantara (*middleman*). Sehingga, struktur rantai nilai kopi di Kecamatan Kindang mencerminkan belum terbangun tata kelola kelembagaan yang mampu mengonsolidasikan produksi, menjamin mutu, dan memperkuat posisi tawar petani. Oleh karena itu, pemetaan rantai nilai menjadi penting untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang bersifat partisipatif, responsif terhadap kebutuhan pasar, dan mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil kepada pelaku utama di tingkat tapak.

Peran Aktor dalam Rantai Nilai

Setiap aktor dalam rantai nilai kopi di Kecamatan Kindang memiliki fungsi dan kepentingan yang saling terkait. Pemahaman terhadap peran dan posisi relatif masing-masing

aktor menjadi penting untuk mengidentifikasi celah dalam penciptaan dan distribusi nilai ekonomi. Aktor utama dalam sistem terdiri atas petani anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), tengkulak lokal, koperasi atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping, dan konsumen akhir.

Petani sebagai produsen utama berperan dalam budidaya, panen, sortasi awal, serta pengeringan biji kopi. Namun, masih menghadapi keterbatasan dalam hal kepemilikan alat pascapanen dan belum memiliki kapasitas untuk melakukan pengolahan lanjutan seperti sangrai atau pengemasan. Kondisi ini menjadikan petani hanya memperoleh nilai tambah pada tingkat paling dasar. Tengkulak lokal menjadi aktor dominan dalam jalur distribusi karena memiliki jaringan pasar dan akses mobilitas yang lebih luas. Namun, kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang sering kali merugikan petani, terutama dalam hal harga jual produk.

“Harga ditentukan pembeli, kami tidak bisa tawar banyak karena butuh uang cepat”
(*Pengurus KTH, Wawancara, April 2025*)

Selain itu, koperasi atau KUPS seharusnya memainkan peran strategis sebagai aggregator dan pengelola mutu produk kopi secara kolektif, termasuk memperkuat branding lokal. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih pasif dan belum memiliki sistem manajemen usaha yang kuat.

“Koperasi sudah ada, tapi belum ada kegiatan rutin dan belum ada pengelolaan pemasaran”
(*Ketua KTH, Wawancara, April 2025*)

Peran LSM seperti SCF penting dalam memberikan fasilitas pelatihan dan penyedia alat, tetapi pendekatan belum menyentuh penguatan sistemik pada kelembagaan lokal, sehingga menciptakan ketergantungan tinggi.

“Kami bantu pelatihan dan alat pengolah, tapi pengelolaan selanjutnya tergantung kelompok”
(*Pendamping LSM SCF, Wawancara April 2025*)

Konsumen akhir, baik lokal maupun dari luar daerah, memiliki potensi untuk terhubung langsung dengan petani, tetapi hingga kini jalur distribusi langsung masih terbatas dan tidak teroganisir.

“Kalau mau beli langsung ke petani bisa saja, tapi jarang ada yang tahu jalannya”
(*Konsumen lokal, Wawancara April 2025*)

Tabel 1. Identifikasi Pelaku dan Peran dalam Rantai Nilai Kopi

Aktor	Peran Utama	Tantangan
Kelompok Tani Hutan	Produksi, panen, sortasi, pengeringan	Minim alat, belum mampu olah lanjutan
Tengkulak	Pengumpulan dan penjualan cepat	Posisi tawar tinggi, harga rendah
Koperasi	Agregasi, peluang branding, akses pasar	Belum aktif, kapasitas manajemen rendah
LSM (SCF)	Pelatihan, fasilitasi pasar, bantuan alat	Belum sistematis, ketergantungan tinggi
Konsumen	Pembeli akhir, kadang beli langsung	Belum terhubung langsung secara luas

Sumber: Wawancara anggota KTH, Pengurus KTH, Ketua KTH, Pendamping LSM SCF, Konsumen Lokal, 2025

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur rantai nilai kopi di Kecamatan Kindang bahwa dominasi aktor perantara (*middlemen*) dan belum sepenuhnya mendukung optimalisasi nilai ekonomi di tingkat produsen. Lemahnya peran koperasi, keterbatasan intervensi kelembagaan, dan kurangnya akses langsung ke konsumen menjadi hambatan utama dalam membangun sistem nilai yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, perlu strategi afirmatif yang mendorong penguatan kapasitas kelembagaan petani dan membuka akses pasar yang lebih partisipatif.

Pemanfaatan Aset Pengolahan dan Nilai Tambah

Upaya peningkatan nilai tambah komoditas kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan melalui penyediaan sarana ekonomi produktif berupa mesin pengolahan kopi. Bantuan tersebut diberikan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) untuk mendukung proses hilirisasi produk kopi yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk biji mentah (*green bean*). Keberadaan mesin sangrai dan penghalus kopi diharapkan mampu meningkatkan nilai jual, memperpendek rantai distribusi, serta membuka peluang pasar baru berbasis produk olahan. Namun, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menerima bantuan tersebut belum memanfaatkannya secara maksimal. Berikut Tabel 2 memperlihatkan jumlah asset yang dimiliki masing-masing KTH dan status pemanfaatannya.

Tabel 2. Kepemilikan Alat Ekonomi Produktif oleh KTH HKm di Kecamatan Kindang

Nama KTH	Mesin Sangrai Kopi	Mesin Penghalus Kopi	Tingkat Pemanfaatan
Gamaccaya	2 Unit	1 Unit	Belum dimanfaatkan
Kahayya	2 Unit	1 Unit	Belum dimanfaatkan
Tabuakkang I	2 Unit	1 Unit	Belum dimanfaatkan
Tabuakkang II	2 Unit	1 Unit	Belum dimanfaatkan

Sumber: Wawancara Anggota KTH dan Pengurus KTH, 2025

“Mesinnya ada, tapi tidak ada yang berani mencoba karena takut rusak” (*Anggota KTH Gamaccaya, Wawancara, April 2025*)

“Kalau diolah jadi bubuk kopi, takut tidak laku karena belum ada pembeli yang pasti” (*Pengurus KTH Kahayya, Wawancara, April 2025*)

Ketersediaan aset pengolahan kopi belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan yang produktif. Pertama, Sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) belum memiliki teknis dalam pengoperasian peralatan akibat belum adanya pelatihan pascapanen yang terstruktur. Kedua, absennya sistem produksi kolektif yang mendukung pengolahan bersama mengakibatkan peralatan hanya tersimpan sebagai inventaris tanpa fungsi operasi. Ketiga, belum tersedianya kepastian pasar terhadap produk olahan kopi menyebabkan petani enggan melanjutkan proses pengolahan karena adanya kekhawatiran produk tidak terserap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan teknis melalui penyediaan peralatan saja belum memadai tanpa disertai strategi pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen rantai nilai, melainkan juga memerlukan dukungan sistem pemasaran, penguatan identitas produk melalui branding serta penerapan standar mutu yang kompetitif di pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelatihan teknis, pembentukan unit usaha bersama, serta pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha kopi seperti kafe, toko produk organik, atau distributor agar aset pengolahan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi ekonomi kelompok.

Tingkat Pendapatan Petani dari Komoditas Kopi

Pendapatan yang diperoleh petani kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan pengamatan terhadap empat Kelompok Tani Hutan (KTH) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan tahunan anggota dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk kopi, madu, dan komoditas lainnya berkisar antara Rp. 18.988.889 hingga Rp. 20.466.667 per tahun. KTH Gamaccaya

mencatatkan pendapatan tertinggi, sedangkan KTH Kahayya berada pada kisaran terendah. Meskipun berada dalam kategori sedang, nilai tersebut mengindikasikan bahwa usaha tani kopi dalam skema HKm belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Tahunan Anggota KTH dari HHBK (Kopi, dll)

Nama KTH	Rata-rata Pendapatan/Tahun (Rp)	Kategori
Gamaccaya	20.466.667	Sedang
Kahayya	18.988.889	Sedang
Tabuakkang I	19.577.778	Sedang
Tabuakkang II	19.011.111	Sedang

Sumber: Wawancara Anggota KTH, 2025

“Harga yang kami terima dari tengkulak hanya sekitar Rp. 25 ribu per kilo, padahal kalau mau diolah dan dikemas bisa dua kali lipat”

(Anggota KTH Tabuakkang I, Wawancara, April 2025)

“Kalau mau jual langsung ke pembeli kota, kami tidak punya jaringan dan tidak tahu cara memasarkannya” (Anggota KTH Tabuakkang II, Wawancara, April 2025)

Pendapatan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor utama diantaranya, pertama sebagian besar petani masih menjual kopi dalam bentuk biji mentah (*green bean*) tanpa pengolahan lanjutan seperti roasting, pengemasan, atau penjualan berbasis merek lokal. Ketidakmampuan melakukan olahan nilai tambah menyebabkan petani kehilangan potensi margin keuntungan yang lebih besar. Kedua, kelembagaan koperasi (KUPS) yang berfungsi sebagai aggregator dan pemasar kopi bekum berjalan efektif, sehingga sebagian besar petani lebih memilih menjual melalui tengkulak lokal yang menawarkan proses jual beli lebih cepat, namun dengan harga yang lebih relative rendah dan tidak transparan. Ketiga, kurangnya informasi pasar, ketiadaan sistem grading dan standar mutu, serta keterbatasan akses ke jaringan pembeli premium menyebabkan posisi tawar petani tetap lemah dalam struktur pasar kopi lokal. Sejalan dengan Suryana et al (2023) yang menekankan bahwa lemahnya fungsi kelembagaan dan transparansi harga merupakan hambatan utama dalam tata kelola rantai nilai kopi di Indonesia.

Kecamatan Kindang memiliki potensi agroklimat yang sesuai untuk pengembangan kopi berkualitas tinggi, khususnya jenis arabika. Namun, tanpa dukungan teknologi, pengetahuan, dan akses pasar, potensi tersebut belum mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan yang signifikan bagi petani. Kondisi serupa pada petani di Flores, rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan dan minimnya akses jaringan pasar menghambat optimalisasi pendatan (Rofi, 2018). Oleh sebab itu, peningkatan dapat dicapai apabila terjadi pergeseran dari model bisnis tradisional menuju rantai nilai berbasis nilai tambah dan kelembagaan yang kuat. Strategi

ini mencakup pengembangan sistem produksi berbasis mutu, pengolahan bersama secara kolektif melalui KUPS, serta pemasaran berbasis digital dan kontrak kemitraan dagang yang adil. Hal ini sejalan dengan Alidyan Kresnawati et al (2025) yang menekankan pentingnya *upgrading* produk, branding, dan integrasi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing kopi lokal.

Tantangan dan Strategi Penguatan Rantai Nilai Kopi dalam Skema HKm

Kelembagaan lokal khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan koperasi (KUPS) berperan penting dalam penguatan rantai nilai kopi di bawah skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Namun, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang menghambat optimalisasi nilai tambah kopi. Tantangan serupa ditemukan oleh Suryana et al (2023), di mana *governance* rantai nilai kopi robusta di Jawa Barat memerlukan intervensi structural untuk memperkuat koordinasi aktor rantai dan meningkatkan kualitas produk. Salah satu mitra eksternal, Lembaga Swadaya Masyarakat Sulawesi Community Foundation (SCF) telah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan teknis dan fasilitasi pemasaran.

Secara umum, terdapat empat tantangan utama yang dihadapi, yaitu Pertama adalah koperasi belum aktif menjalankan perannya sebagai aggregator pemasaran, sehingga anggota KTH bergantung pada jalur tengkulak yang cenderung merugikan posisi tawar petani. Kedua, tidak adanya sistem grading mutu dan penetapan harga premium membuat kopi HKm sulit bersaing di pasar bernilai tinggi seperti specialty coffee. Ketiga, akses pasar yang dimiliki kelompok masih terbatas dan belum stabil disebabkan belum terbangunnya jaringan distribusi yang solid. Dan keempat, minimnya inovasi dalam branding dan pengemasan produk menyebabkan kopi yang dihasilkan tidak memiliki diferensiasi, sehingga cenderung dipasarkan sebagai komoditas mentah dengan nilai ekonomi yang rendah.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan rantai nilai kopi yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Strategi pertama yaitu meningkatkan kapasitas teknis dan koperasi meliputi keterampilan pengolahan pascapanen, manajemen mutu, dan pengemasan yang sesuai standar pasar. Kedua, pemanfaatan peralatan pengolahan kopi yang telah tersedia melalui pengelolaan kolektif dan pelatihan berbasis praktik untuk meningkatkan kualitas produk olahan. Ketiga, pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah seperti roasted bean dan kopi bubuk dengan label merek lokal untuk meningkatkan daya saing. Keempat, perluasan saluran pemasaran berbasis kemitraan dan digitalisasi, misal dengan memanfaatkan platform e-commerce serta menjalin hubungan bisnis dengan kafe lokal dan toko produk organik. Kelima, penerapan sistem insentif berbasis mutu melalui kontrak

dagang atau skema perdagangan berkeadilan (*fair trade*) sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian Alidyan Kresnawati et al (2025) mendukung strategi *upgrading* nilai tambah melalui diferensiasi produk dan kolaborasi multisektor bagi UMKM kopi Indonesia. Selain itu, model bisnis inklusif yang diterapkan terbukti meningkatkan kesejahteraan petani melalui integrasi kepemilikan lokal dan penguatan *branding* (Mulyati et al., 2024).

Implementasi strategi menuntut sinergi, koperasi, pemerintah, dan mitra pendukung agar tercipta rantai nilai yang lebih inklusif dan berorientasi pasar. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan integrasi teknologi pengolahan dapat meningkatkan posisi tawar petani, memperluas akses pasar sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur rantai nilai kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang masih didominasi oleh jalur distribusi melalui tengkulak. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya posisi tawar petani terhadap pasar, yang berimplikasi pada rendahnya nilai tambah yang diterima di tingkat produsen. Struktur rantai nilai yang dikendalikan oleh perantara cenderung menempatkan produsen kecil pada posisi marginal (Kaplinsky & Morris, 2000). Studi Assefa (2022) menekankan bahwa mekanisme kolektif seperti koperasi berperan penting dalam mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak serta meningkatkan margin keuntungan. Namun, kelembagaan seperti koperasi atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum berfungsi secara optima; sebagai agregator maupun pengelola mutu, sehingga kontribusinya dalam mendistribusikan nilai ekonomi masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan petani melalui pelatihan manajerial, akses permodalan, dan pengembangan jejaring pemasaran agar peran kolektif dapat berjalan efektif.

Peran kelembagaan lokal dan mitra eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menjadi faktor penentu dalam penguatan rantai nilai kopi. LSM Sulawesi Community Foundation (SCF) memberikan dukungan pelatihan dan fasilitasi pemasaran, tetapi pendekatan yang digunakan bersifat proyek jangka pendek sehingga tidak cukup membangun kemandirian kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi eksternal tanpa penguatan kelembagaan internal berpotensi menciptakan ketergantungan. Sebaliknya,

penguatan kapasitas koperasi dan pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang merupakan Langkah yang lebih efektif untuk menciptakan tata kelola rantai nilai yang berkeadilan.

Pemanfaatan aset pengolahan kopi seperti mesin sangrai dan penghalus kopi yang belum optimal mencerminkan bahwa intervensi teknis semata tidak cukup untuk meningkatkan nilai tambah produk. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan keterampilan teknis petani dan ketiadaan sistem produksi kolektif yang berdampak pada tidak berjalannya proses hilirisasi. Peningkatan nilai tambah kopi membutuhkan dukungan kapasitas sumber daya manusia, strategi pengelolaan bersama, dan jaminan pasar sehingga tanpa adanya ketiga elemen tersebut, potensi peningkatan pendapatan melalui diversifikasi produk tidak dapat tercapai (Prathita et al., 2023).

Pendapatan petani dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk kopi yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa usaha kopi dalam skema HKm belum mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Penyebab utama yaitu pola bisnis tradisional yang mengadakan penjualan biji kopi mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Diversifikasi produk dan penguatan branding lokal merupakan strategi penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan petani (Ismail, 2017). Dengan demikian, pengembangan rantai nilai kopi berbasis nilai tambah dan penguatan kelembagaan koperasi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak, memperbaiki tata kelola pasar, dan mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur rantai nilai kopi pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang masih berada pada tahap yang belum optimal. Ketergantungan petani terhadap tengkulak menyebabkan posisi tawar tetap lemah dan nilai tambah yang diperoleh relative rendah. Kelembagaan koperasi atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diharapkan berperan sebagai aggregator, belum menjalankan fungsi secara efektif. Selain itu, pemanfaatan sarana pengolahan kopi masih minim akibat keterbatasan keterampilan teknis dan ketidakpastian akses pasar. Tingkat pendapatan petani yang tergolong kategori sedang mencerminkan bahwa usaha kopi dalam skema HKm belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan rantai nilai melalui hilirisasi sebagai prioritas utama.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah strategis diperlukan untuk memperkuat rantai nilai kopi dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memfasilitasi pelatihan dan berkelanjutan terkait pengolahan pascapanen, manajemen mutu, dan pengembangan kapasitas kelembagaan agar koperasi dapat menjalankan fungsi sebagai aggregator dan pengelola standar mutu secara efektif. Dukungan dalam pembentukan jaringan pasar, termasuk pemanfaatan platform digital dan kemitraan dengan pelaku usaha kopi, menjadi kunci untuk memperluas akses pemasaran. Di sisi kelembagaan, koperasi harus mengoptimalkan perannya dalam mengonsolidasikan hasil produksi dan mengembangkan unit usaha kolektif untuk pengolahan kopi serta penguatan branding lokal. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menelaah variable lain yang berpengaruh seperti akses modal, peran gender, serta keberlanjutan rantai nilai dalam skema perhutanan sosial, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan.

REFERENSI

- Alidyan Kresnawati, M., Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, B., & Dugis, V. M. (2025). *Implementation of Upgrading in Global Value Chain Activities of Indonesian Coffee SMEs: Results of Empirical Study*. 23–34. <https://doi.org/10.26593/jihi.v21i1.7116.23-33>.
- Assefa, S. (2022). *Value Chain Analysis of Coffee: Key for Upgrading the Smallholder Farmers in Sidama Zone of SNNPRS*.
- Ismail, A. R. (2017). The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 29(1), 129–144. <https://doi.org/10.1108/APJML-10-2015-0154>.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). *A handbook for value chain research* (Vol. 113). University of Sussex, Institute of Development Studies Brighton.
- Mulyati, H., Indrawan, D., Abdullah, A., & Yusri, D. (2024). Leading Inclusive Growth: Comparing Business Models in The Coffee Value Chain, West Java Province. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 21(3), 420–436. <https://doi.org/10.17358/jma.21.3.420>.
- Prathita, A. D., Aji, J. M. M., & Purwatiningsih, R. (2023). Supply chain and quality management of Arabica coffee: A case of smallholders' agribusiness in Bondowoso Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 2583(1), 100013.
- Rofi, A. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Menggunakan Analisis Rantai Nilai dan Sumber Penghidupan. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(1), 77. <https://doi.org/10.22146/mgi.33424>.
- Simamora, H. I. (2024). Kontribusi Pertanian Agroforestry Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kopi. *Agri Wiralodra*, 16(1), 1–11.

- Suryana, A., Harianto, H., Syaikat, Y., & Harmini, H. (2023). The Value Chain Governance of Robusta Coffee in Bogor Regency. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 20(2), 175–187. <https://doi.org/10.17358/jma.20.2.175>.
- Wright, D. R., Gordon, A., Bennett, R. E., Selinske, M. J., Lentini, P. E., Garrard, G. E., Rodewald, A. D., & Bekessy, S. A. (2024). Biodiverse coffee plantations provide co-benefits without compromising yield. *Journal of Sustainable Agriculture and Environment*, 3(3).